

2019



LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Jln. Jend. Sudirman No 68 Telp 0511 4799507 Marabahan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Laporan Kinerja pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun untuk memenuhi kewajiban seperti diamanatkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuannya adalah memberikan informasi kinerja yang telah dilaksanakan sehingga dapat dijadikan acuan untuk perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

BKPP Kabupaten Barito Kuala telah menyelesaikan sejumlah program dan kegiatan yang berkaitan dengan implementasi dari Rencana Kerja Tahun 2019 yang juga masa pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis BKPP Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Rencana Strategis BKPP Tahun 2017-2022 memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan memuat persepektif keberhasilan dan kegagalan yang akan menjadi tantangan bagi BKPP Kabupaten Barito Kuala melalui peningkatan kinerja yang lebih baik, fokus dan terarah.

Penyusunan laporan ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Harapan kami, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dalam menilai kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan peran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala untuk memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya good governance.

Marabahan, 26 Februari 2020

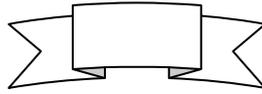
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,**

Dr. H. HARDIAN NOOR, M.Si
NIP. 19600909 198202 1005

Daftar Gambar

Gambar 1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKPP Kabupaten Barito Kuala	10
----------	--	----

Daftar Tabel



RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan.

Keberhasilan Capaian IKU ditunjukkan pada 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan capaian ke dua Indikator Kinerja Utama belum mencapai target, dengan rincian :

- a) Persentase PNS yang memenuhi kompetensi 84,26 %
- b) Indek kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian 85,00 dengan nilai BAIK karena angka indek **85,00** berada pada interval konversi 76,61 – 88,30.

Laporan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dibidang Kepegawaian. Sebagai salah satu upaya peningkatan akuntabilitas kinerja maka laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator , dengan rincian sebagai berikut :

Tabel A

Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Meningkatnya sumberdaya aparatur yang kompeten	1	84,26 %	-	0%	0	0%	1	84,26
2	Meningkatnya Pelayanan Apartur Yang Berkualitas	1	85,00 %	-	Indeks	1	100	-	-

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Lampiran	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Isu Strategis	5
1.4. Landasan Hukum	5
1.5. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Perencanaan Strategis	7
2.2. Indikator Kinerja 2019	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. Capaian Kinerja	10
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	15
3.3. Analisis Capaian Kinerja	16
3.4. Akuntabilitas Keuangan	36
BAB IV PENUTUP	39

Daftar Gambar

Gambar 1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKPP Kabupaten Barito Kuala	4
----------	--	---

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator	8
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama	8
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja	9
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian kinerja	11
Tabel 3.2	Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja Yang tidak tercapai	12
Tabel 3.1.1	Capaian Indikator Kinerja Utama	12
Tabel 3.1.2	Capaian IKU berdasarkan presentase	13
Tabel 3.1.3	Capaian IKU berdasarkan kategori	13
Tabel 3.2.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	14
Tabel 3.1.5	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019	14
Tabel 3.1.6	Pencapaian Target Sasaran Strategis	15
Tabel 3.2.1	Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Tahun 2019	16
Tabel 3.2.2	Perbandingan Target dan Realisasi IKU I Tahun 2019	17
Tabel 3.2.3	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun Lalu	18
Tabel 3.2.4	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	19
Tabel 3.2.5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2019	21
Tabel 3.2.6	Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2 Tahun 2019	22
Tabel 3.2.7	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun Lalu	23
Tabel 3.2.8	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	23
Tabel 3.2.9	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra	24
Tabel 3.2.10	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja 2	34
Tabel 3.2.11	Komposisi Belanja BKPP	36
Tabel 3.2.12	Pagu dan Realisasi Anggaran	37
Tabel 3.2.13	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian sasaran	37
Tabel 3.2.14	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran	38

Bab Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala sebagai lembaga teknis daerah dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja menuju kearah yang lebih baik.

Capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintahan Kabupaten Barito Kuala.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 pasal 25 Menyatakan bahwa Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas “membantu Bupati menyelenggarakan Manajemen Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ”

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut maka pada pasal 25 ayat (1) dimaksud

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai **fungsi** :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang diklat, pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang diklat, pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang diklat, pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang diklat, pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang diklat, pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan [dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan perundang-undangan.

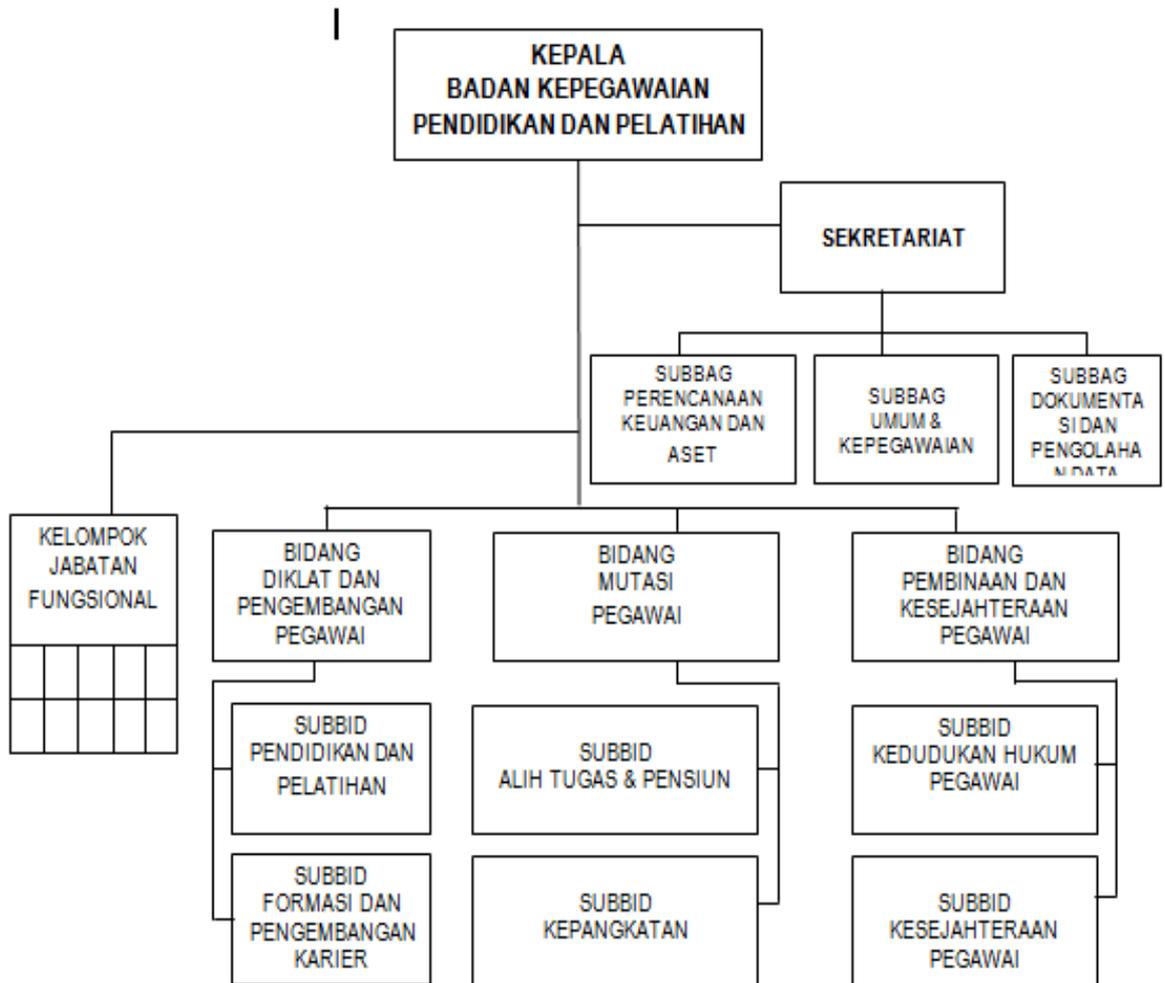
Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menghasilkan restrukturisasi Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala kembali ditetapkan melalui Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan.

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan. (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 36).

Berpedoman pada Peraturan Daerah dimaksud, Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala secara **Struktural Organisasi** terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, yang dibantu oleh :
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
 - Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Pengolahan Data.
3. Kepala Bidang Diklat Dan Pengembangan Pegawai dibantu oleh :
 - Kepala Sub Bidang Diklat;
 - Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengembangan Karier;
4. Kepala Bidang Mutasi Pegawai yang dibantu oleh:
 - Kepala Sub Bidang Alih Tugas dan Pensiun;
 - Kepala Sub Bidang Kepangkatan.
5. Kepala Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai, yang dibantu oleh :
 - Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai;
 - Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :



I.3 Isu Strategis

Perubahan peraturan di bidang pemerintahan daerah yang berdampak pada bidang kepegawaian membutuhkan antisipasi penataan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada analisis beban kerja setiap unit kerja. Dengan demikian komposisi pegawai yang ada juga sesuai kebutuhan. Komposisi pegawai dalam golongan ruang, pendidikan, dan usia menjadi persoalan dalam perencanaan kebutuhan pegawai berbasis kinerja dan kompetensi.

Berbagai prasyarat yang berorientasi pada manajemen kepegawaian saat ini seperti analisa jabatan, klasifikasi jabatan dan standar kompetensi jabatan masih pembenahan ke arah yang lebih baik sesuai peraturan yang berlaku.

Berikut ini dapat disampaikan beberapa hal yang terkait dengan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi adalah :

1. Belum sepenuhnya PNS sesuai kompetensi ;
2. Belum terlaksananya sistem remunerasi PNS berbasis kinerja ;
3. Rendahnya pemahaman pejabat kepegawaian menyangkut tupoksinya.

I.4 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan rencana strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala kurun waktu tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018, tentang Pedoman Umum pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

I. 5 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Insyansi Pemerintah (LKIP)

Penyusunan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala, Isu Strategis yang dihadapi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala, landasan hukum pembuatan dokumen LKIP, dan Sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis , Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja tahun 2018.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

Bab Perencanaan Kinerja

2.1 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan Bupati Barito Kuala Nomor 256 Tanggal 4 Juni 2018 Tahun 2018, tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala adalah :

2.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan adalah :

1. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten, dengan indikator Persentase PNS yang memenuhi kompetensi.
2. Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas, dengan indikator Persentase Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

2.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran secara efektif adalah sasaran yang bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, sasaran BKPP adalah :

1. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten
2. Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas

Secara lebih rinci tujuan, Indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017-2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Sumberdaya Aparatur yang Kompeten	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Persentase PNS yang Memenuhi Kompetensi	Persentase PNS yang Memenuhi Kompetensi
2	Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas	Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian

2.1.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 dapat di lihat dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala

No.	Indikator Kerja Utama	Formulasi
1	2	3
1.	Persentase PNS yang memenuhi Kompetensi	Jumlah PNS yang kompeten dibagi total PNS SeKab Batola kali 100
2.	Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang

2.1.4 Perjanjian Kinerja 2019

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019, bisa dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja (PK)
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)
1	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Persentase PNS yang memenuhi Kompetensi	%	89%	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.816.249.000
					Pendidikan Kedinasan	1.209.530.000
2	Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas	Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks	85	Peningkatan Disiplin Aparatur	3.526.095.000
					Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.539.984.500

Pada Tahun 2019 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito memiliki dua sasaran dengan 2 indikator kinerja yaitu Persentase PNS yang memenuhi kompetensi dan Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

Indikator kinerja Persentase PNS yang memenuhi kompetensi didukung 2 program yaitu :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 1.816.249.000,00
2. Program Pendidikan Kedinasan dengan anggaran sebesar Rp. 1.209.530.000,00.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Kepegawaian didukung 2 (dua) Program yaitu :

1. Program Peningkatan disiplin aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 3.526.095.000,00
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 1.539.984.500,00

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 yang telah direviu, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019.

Bab Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2019, Renja Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel .3.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Nomor 188.45/19/BKPP/2018 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	Persen	89 %	74,99	84,26
2	Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas	Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Kepegawaian	Indeks	85	85,00	100

Berdasarkan Tabel 3.1.1 Sasaran Strategis 1 meningkatnya sumber daya aparatur yang kompeten dengan indikator persentase PNS yang memenuhi kompetensi dengan target 89 % dan terealisasi 74,99 dengan capaian 84,26 % (Jumlah PNS yang kompeten/total ASN x 100). Di bandingkan dengan realisasi tahun 2018 indikator persentase PNS yang memenuhi kompetensi target 85 % realisasi 81,65 % dengan capaian 96,06 % terjadi penurunan sebanyak 11,8 % dari tahun 2018 ke tahun 2019.

Sasaran strategis 2 meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dengan indikator Indeks kepuasan PNS terhadap Pelayanan Kepegawaian dengan target 85 dan terealisasi 85,00 dengan capaian 100 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 indikator ke 2 ini dari target 80 % realisasi 76,47 % dengan capaian 95,59 %, terjadi kenaikan sebesar 4,41 % dari tahun 2018.

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Berdasarkan Persentase
Tahun 2019

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	1
= 100	Tercapai/Sesuai target	1
>100	Melebihi target	-

Berdasarkan Tabel 3.1.2 Capaian IKU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan persentase <100 atau tidak tercapai sebanyak 1 dan tercapai/sesuai target sebanyak 1.

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Berdasarkan Kategori
Tahun 2019

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	1
2	Baik	75 – 89,99	1
3	Cukup	65 – 74,99	-
4	Kurang	50 – 64,99	-
5	Sangat kurang	0 – 49,99	-

Berdasarkan table 3.1.4 indikator yang dinilai sangat baik sebanyak 1 indikator .

Tabel 3.1.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Sasaran Strategis 1	1	84,26 %	Tidak tercapai
2	Sasaran Strategis 2	1	100 %	Sangat baik

Pada tabel di atas diketahui bahwa sasaran strategis 1 pada tahun 2019 tidak tercapai, sedangkan sasaran strategis 2 tahun 2019 dengan predikat sangat baik.

Tabel 3.1.5
Capaian Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 -49,99 Sangat kurang	50 -64,99 Kurang	65 -74,99 Cukup	75 -89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	1	84,26 %				Baik	
2.	Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas	1	100					Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.2.2, Sasaran Strategis 1 dengan jumlah indikator sebanyak 1 dan rata-rata capaian sasaran 84,26 % dengan predikat baik.

Sasaran Strategis 2 jumlah indikator sebanyak 1 dan rata-rata capaian sasaran 100 dengan predikat Sangat baik.

Tabel 3.1.6

**Pencapaian Target Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2019**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	1	84,26 %	0	0	0	0	1	84,26
2.	Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas	1	100	0	0	1	100	0	0

Dari table diatas bisa dilihat bahwa dari ke 1 indikator sasaran pencapaiannya dibawah target, yaitu Persentase PNS yang memenuhi kompetensi.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Nomor 188.45/19/BKPP/2018 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, telah ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	1 indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas	1 indikator

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1.

MENINGKATNYA SUMBER DAYA APARATUR YANG KOMPETEN

Sasaran “Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang terbuka dan melayani”, Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan bersih serta Pelayanan Publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi pada sasaran “ Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan berbasis Teknologi Informasi” . Untuk upaya pencapaian sasaran ini Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala menetapkan indikator “Persentase PNS yang memenuhi kompetensi”.

“Persentase PNS yang memenuhi kompetensi” dengan formulasi perhitungan :

$$\text{Jumlah PNS yang memenuhi kompetensi dibagi total pegawai se Kabupaten Barito Kuala di } \times 100.$$

Capaian kinerjanya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja 2019.

Indikator kinerja utama” Persentase PNS yang memenuhi kompetensi” berdasarkan Renstra 2017-2022, Tahun 2019 ditargetkan dengan nilai 89 %. Berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dengan nilai realisasi sebesar 74,99 % diperoleh dari jumlah pegawai yang kompeten sebanyak 3.457 PNS dibagi 4.610 total PNS x 100 , maka capaian kinerja untuk indikator utama ini adalah 84,26 % (74,99%/85%X100).

Tabel 3.2.2

Perbandingan Target dan Realisasi IKU
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	89 %	74,99 %	84,26

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator kinerja utama” Persentase PNS yang memenuhi kompetensi” berdasarkan Renstra 2017-2022, Tahun 2018 ditargetkan dengan nilai 85 %. Berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dengan nilai realisasi sebesar 70,95% diperoleh dari jumlah pegawai yang kompeten sebanyak 3.447 PNS dibagi 4.858 total PNS x 100 , maka capaian kinerja untuk indikator utama ini adalah 83,47 % $(70,95\%/85\% \times 100)$. Sedangkan pada tahun 2019 ditargetkan dengan nilai 89 %. Berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dengan nilai realisasi sebesar 74,99 % diperoleh dari jumlah pegawai yang kompeten sebanyak 3.457 PNS dibagi 4.610 total PNS x 100 , maka capaian kinerja untuk indikator utama ini adalah 84,26 % $(74,99\%/89\% \times 100)$, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.2.3

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun ini dengan Realisasi dan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Ket.
			Relisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	Persen	70,95	83,47	74,99	84,26	-

3. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja 2017-2022

Dalam pengukuran capaian kinerja jangka menengah yang diperhitungkan adalah seperti yang tertuang dalam sasaran strategis Renstra tahun 2017-2022. Caranya adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BKPP Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 terhadap realisasi capaian sampai dengan tahun 2019, capaian realisasi terhadap target Renstra BKPP 2017 -2022 dapat dilihat seperti tabel :

Tabel 3.2.4
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Utama	Awal Renstra	Tahun 2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap (2022)
		Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	80	89	74,99	84,26	100	84,26

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala tidak ada perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Peningkatan kompetensi aparatur dengan melalui pendidikan dan pelatihan hanya dapat dicapai sebesar 84,26 % sedangkan pada tahun 2018 83,47, jika dibandingkan dari kinerja tahun 2018, kenaikan hanya 0,69 %.

Pencapaian kinerja dimaksud disebabkan adanya :

1. Jumlah yang diusulkan lebih terokomodir dari tahun lalu.
2. Adanya Perjanjian Kerjasama antara BPSDM Propinsi Kalimantan Selatan dengan BKPP Kabupaten Barito Kuala :
 - 1) Nomor : 893/004/BPSDMD/2019 dan Nomor : 893/06-DiklatBangpeg/BKPP/2019, tanggal 15 Mei 2019, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Pelatihan Dasar Calon PNS) Golongan II Angkatan III, IV, V, VI dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019.
 - 2) Nomor : 893/005/BPSDMD/2019 dan Nomor : 893/05-Diklat/BKPP/2019, tanggal 8 April 2019, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Pelatihan Dasar Calon PNS) Golongan III Angkatan III, IV, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019.
 - 3) Nomor : 893/006/BPSDMD/2019 dan Nomor : 893/04-DiklatBangpeg/BKPP/2019, Tanggal 21 Juni 2019, tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (LATPIM II) Angkatan XII, dan XXVI Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019.

- 4) Nomor : 893/007/BPSDMD/2019 dan Nomor : 893/03-DiklatBangpeg/BKPP/2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat III (LATPIM II) Angkatan XII, XIII, XIV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019.
- 5) Nomor : 893/008/BPSDMD/2019 dan Nomor : 893/02-DiklatBangpeg/BKPP/2019, tanggal 12 Januari 2019, tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat IV (LATPIM II) Angkatan XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019.

Kegagalan Capaian Indikator Sasaran 1 Peresentase PNS yang memenuhi kompetensi disebabkan oleh :

1. Usulan peserta diklat yang disampaikan ke BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tidak dipenuhi, karena kegiatan Diklat tersebut dilaksanakan dengan pola penyertaan antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dengan BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan (untuk Diklat Prajabatan dan Diklat Struktural).
2. Diklat PNS yang diikuti berdasarkan alokasi dana yang tersedia.
3. Terdapat PNS yang tidak memenuhi kriteria.
4. Belum dimilikinya fasilitas diklat.

Strategi kedepan :

1. Untuk Tahun yang akan datang agar anggaran untuk diklat dapat dirasionalisasikan.
2. Dana Diklat terpusat pada satu sumber saja yaitu satu pintu di anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala.
3. Diharapkan semua peserta terpenuhi untuk mengikuti diklat dengan menambah kuota peserta dari pihak penyelenggara diklat.
4. Mengajukan pembangunan gedung diklat di daerah yang sesuai standar agar sebagian diklat dapat dilaksanakan di daerah.

6. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Tingkat efisiensi kinerja dapat dilihat dari selisih antara persentase capaian kinerja dikurangi persentase penyerapan anggaran, tingkat efisiensi dalam mencapai sasaran strategis yang ada pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat seperti tabel :

Tabel 3.2.5
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	84,26	94,17	9,91

Dari data penyerapan anggaran dalam mendukung sasaran strategis yang ada pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat adanya efisiensi anggaran dalam pencapaian targetnya.

Sasaran strategis pertama meningkatnya Sumber daya aparatur yang kompeten dengan indikator kinerja persentase PNS yang memenuhi kompetensi berdasarkan hasil assesmen terdapat tingkat efisiensi 9,91 %.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan

Keberhasilan pencapaian Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Pada Tahun 2019 tidak terlepas dengan adanya Program dan Kegiatan yang sangat berpengaruh menunjang terhadap pencapaian keberhasilan. Adapun Program dan Kegiatan yang sangat berpengaruh dalam menunjang pencapaian kinerja utama adalah sebagai berikut :

Capaian indikator Sasaran 1 Persentase PNS yang memenuhi kompetensi dukung oleh :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
2. Program Pendidikan Kedinasan dengan kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Penjenjangan Struktural.

Sumber data capaian adalah target di Renstra 252 sedangkan realisasi di tahun 2019 sebanyak 208 PNS yang mengikuti Diklat. Sumber Data diperoleh dari Bidang Diklat dan Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala.

Sasaran Strategis 2.

MENINGKATNYA PELAYANAN APARATUR YANG BERKUALITAS

Untuk melihat capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas**” Upaya pencapaian sasaran ini, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala menetapkan indikator kinerja, yaitu Indeks kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

Persentase kepuasan PNS terhadap pelayanan administrasi kepegawaian dengan formulasi perhitungan :

“Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi di kali nilai penimbang”

Capaian kinerjanya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja 2019

Indikator kinerja utama” Persentase kepuasan PNS terhadap pelayanan administrasi kepegawaian” berdasarkan Renstra 2017-2022.

Capaian masing-masing sasaran dengan 1 indikator tersebut pada tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.6
Perbandingan Target dan Realisasi IKU
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas	Indeks Kepuasan PNS terhadap pelayanan administrasi kepegawaian	85	85,00	100

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada tahun 2018 target 80 realisasi 76,47 dengan capaian target 95,59 sedangkan pada tahun 2019 target 85 realisasi 85,00 dengan realisasi 100 jadi terdapat kenaikan dari tahun lalu , dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.7

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun ini dengan Realisasi dan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Ket.
			Relisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Indeks kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks	75,47	95,59	85,00	100	

3. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja 2017-2022

Target dan realisasi indicator kinerja utama (IKU) 2019 dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.2.8

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Utama	Awal Renstra	Target	Tahun 2018		Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap (2022)
			Realisasi	Realisasi (%)		
Indeks kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	75	85	85,00	100	100	100

Tabel 3.2.9

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019	Target Renstra	Selisih Capaian	Ket.
			Realisasi	Realisasi	(%)	
1.	Indeks kepuasan PNS terhadap pelayanan Administrasi kepegawaian	Indek	85,00	85	100	Capaian diperoleh dari realisasi dibagi target renstra

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pada : Hasil Survey Indeks kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian (IKM) ini adalah dilingkungan SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala yang mana Respondennya adalah PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Pelaksanaan Survei Indeks kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian (IKM) pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dilaksanakan pada bulan September tahun 2019 sampai dengan Desember 2019.

Pengolahan Data Indeks kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian di hitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur Pelayanan. Dalam penghitungan Indeks kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian terhadap 9 unsur survei IKM.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja unit pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk selanjutnya dijadikan bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik, dengan melakukan penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dan pengaduan, serta peningkatan kompetensi petugas pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna serta untuk menumbuhkan kreativitas, prakarsa dan peran serta.

Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan secara tetap setiap 1 (satu) tahun sekali. Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisis survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (*trend*) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

A. Data Kuesioner

Gambaran karakteristik responden Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah PNS (orang)	Persentase (%)
Laki-laki	160	53,33
Perempuan	140	46,67
Jumlah	300	100

Tabel 2. Jumlah Responden Berdasarkan Umur

Kelompok Umur	Jumlah PNS	
	N	%
18-25	15	5
26-35	100	33,33
36-45	84	9,3
46-60	101	16,83
Jumlah	300	100

Tabel 3. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS (orang)	Persentase (%)
SMA	94	31,33
Diploma III/IV	88	29,33
Sarjana S1/S2	118	39,34
Jumlah	300	100

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, maka jumlah sampel untuk Survei Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2019 sebanyak 300 orang responden.

Dari jumlah responden sebanyak 300 orang tersebut, jumlah kuesioner yang telah dikembalikan sebanyak 300 lembar kuisisioner, dan jumlah kuisisioner yang dapat diproses lebih lanjut atau diolah sebanyak 300 lembar kuisisioner.

B. Perhitungan

Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert yaitu skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi Nilai. Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh : jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur, maka :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Tabel 9. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	BAIK
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	SANGAT BAIK

Dari kuesioner yang disampaikan kepada masyarakat dengan jumlah 375 lembar kuisisioner, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 10. Nilai Masing-Masing Unsur Pelayanan

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA UNSUR	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR
1	Persyaratan Pelayanan	1104	3,68	0,04
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1154	3,85	0,43
3	Waktu Penyelesaian	1154	3,85	0,43
4	Biaya/Tarif Pelayanan	1204	4,01	0,45
5	Kesesuaian Produk Layanan	1103	3,68	0,41
6	Kompetensi Pelaksana dalam Pelayanan	1003	3,34	0,37
7	Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan	1103	3,68	0,41
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	1204	4,01	0,44
9	Penanganan Pengaduan	1154	3,85	0,43

Dari tabel 10 di atas, terlihat bahwa unsur biaya/tarif dalam pelayanan dan kualitas sarana dan prasarana yang memiliki nilai unsur tertinggi adalah 4,01, sedangkan Unsur Kompetensi pelaksana dalam pelayanan memiliki nilai terendah yaitu 3.34.

C. Deskripsi Hasil

1. Unsur Persyaratan Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian persyaratan pelayanan sebesar 3,40.

Hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian persyaratan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Nilai Unsur Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Kesesuaian Persyaratan	3,40	3,68

Untuk 2019 unsur kesesuaian persyaratan pelayanan telah dibuat baku disesuaikan peruntukannya.

2. Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kemudahan prosedur sebesar 3,45

Hasil nilai survei untuk unsur kemudahan prosedur tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Nilai Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Kemudahan Prosedur	3,45	3,85

Untuk 2019 unsur kemudahan prosedur pelayanan dibuat lebih mudah dan simpel.

3. Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kecepatan waktu pelayanan sebesar 3,19

Hasil nilai survei untuk unsur kecepatan waktu pelayanan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Nilai Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Kecepatan Waktu Pelayanan	3,19	3,85

Untuk 2019 unsur kecepatan waktu pelayanan telah dilengkapi dengan perangkat kerja yang memadai dan petugas yang selalu ada ditempat serta di sesuaikan Maklumat Pelayanan.

4. Unsur Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kewajaran biaya/ tariff Pelayanan sebesar 3,99

Hasil nilai survei untuk unsur kewajaran biaya/tarif tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Nilai Unsur Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Kewajaran Pelayanan biaya/tariff	3,99	4,01

Untuk 2019 nilai kewajaran biaya/tarif pelayanan dipengaruhi dengan cara petugas pelayanan dalam melayani masyarakat dengan tidak menerima biaya dari masyarakat

5. Unsur Kesesuaian Produk Layanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian produk layanan sebesar 3,24

Hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian produk layanan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 15. Nilai Unsur Kesesuaian Produk Layanan Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Kesesuaian Produk Layanan	3,24	3,68

Untuk 2019 kesesuaian produk layanan, petugas dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan uraian tugas dan fungsi Badan.

6. Unsur Kompetensi Pelaksana Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kompetensi petugas sebesar 3,00

Hasil nilai survei untuk unsur kompetensi petugas tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Nilai Unsur Kompetensi Petugas Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Kompetensi Petugas Pelayanan	3,30	3,34

Untuk 2019 kompetensi petugas telah di tingkatkan dengan mengikuti workshop, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Unsur Perilaku Pelaksana Pelayanan

Dari hasil survey tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur perilaku petugas sebesar 3,00

Hasil nilai survei untuk unsur perilaku petugas tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Nilai Unsur Perilaku Petugas Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,00	3,68

Untuk 2019 perilaku petugas di harapkan dapat meningkatkan pelayanan dan siap melayani dengan ramah

8. Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kualitas sarana dan prasarana sebesar 3,40

Hasil nilai survei untuk unsur kualitas sarana dan prasarana tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Nilai Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Kualitas Sarana dan Prasarana	3,40	4,01

Untuk 2019 Kualitas Sarana dan Prasarana pelayanan di harapkan dapat ditingkatkan untuk tercapainya pelayanan yang maksimal.

9. Unsur Penanganan Pengaduan Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur penanganan pengaduan sebesar 3,28

Hasil nilai survei untuk unsur penanganan pengaduan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Nilai Unsur Penanganan Pengaduan Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Penanganan Pengaduan	3,28	3,85

Untuk 2019 penanganan pengaduan pelayanan memiliki nilai tertinggi kedua karena masyarakat sudah mengerti dan paham akan prosedur pelayanan yang ada di BKPP.

Berdasarkan uraian di atas, maka didapat kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Secara umum kualitas pelayanan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dikategorikan oleh PNS penggunaannya pada posisi **B** dengan kategori **BAIK**, karena angka indeks **85,00** berada pada interval konversi 76,61 – 88,30.

B. Saran dan Rekomendasi

Dari kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

Berdasarkan hasil perhitungan bahwa terdapat dua unsur pelayanan yang mendapat nilai tertinggi yaitu :

1. Kewajaran biaya/Tarif
2. Kualitas sarana dan prasarana

Sejak diberlakukannya Perda Bebas Pungli maka semua unsur pelayanan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala tidak dipungut biaya / di Gratiskan. Dan semua pelaksana pelayanan selalu siap melayani dan menyelesaikan setiap permasalahan dan pengaduan PNS.

Adapun Fasilitas – fasilitas pelayanan yang sudah tersedia diantaranya :

1. Ruang pelayanan satu pintu.
2. Ruang tunggu yang memadai.
3. Petugas pelayanan yang selalu siap melayani PNS dalam menyelesaikan setiap urusan sesuai bidang yang ada di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

Adapun Saran – saran yang dapat diberikan untuk Petugas Pelayanan Satu Pintu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala yaitu Siap melayani dan membantu PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala tidak ada perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator Sasaran 2 Persentase kepuasan PNS terhadap Pelayanan Kepegawaian didukung oleh :

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
2. Program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan :
 - a. Seleksi penerimaan CPNS,
 - b. Penempatan PNS,
 - c. Penataan system administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
 - d. Pembangunan dan pengembangan system informasi Kepegawaian Daerah
 - e. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin
 - f. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas dan
 - g. Pelaksanaan sumpah/janji PNS.

Keberhasilan capaian Indikator Sasaran 2 Indek kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian disebabkan oleh berdasarkan hasil survai kepuasan masyarakat terhadap indeks kepuasan PNS terhadap pelayanan administrasi kepegawaian semua unsur BAIK karena angka indek **85,00** berada pada interval konversi 76,61 – 88,30.

Pelayanan administrasi kepegawaian pendukung IKU yang diberikan sebagai berikut :

- Jumlah Izin Perkawinan/Perceraian sebanyak 13 orang,
- Jumlah Pemakaman PNS yang meninggal dunia sebanyak 4 orang,
- Jumlah Hukuman Disiplin PNS sebanyak 6 PNS,

- Jumlah Kenaikan Gaji Berkala sebanyak 2198 SK,
- Jumlah Cuti sebanyak 870 PNS,

- Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Pegawai sebanyak 182 Kartu,
- Jumlah Penyerahan Satyalancana Karya Satya sebanyak 386 PNS
- Jumlah Sumpah Janji PNS sebanyak 80 PNS.

Kegagalan capaian Indikator Sasaran 2 Persentase kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian, sebagai berikut :

1. Masih belum tersedianya petugas khusus pelayanan yang kompeten.

Srategi kedepan :

1. Untuk meningkatkan kompetensi petugas agar mengikuti workshop, bimbingan tekhnis, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.2.10
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas	Indeks kepuasan PNS terhadap pelayanan Administrasi kepegawaian	100	61,35	38,65

Dari data penyerapan anggaran dalam mendukung sasaran strategis yang ada pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat adanya efisiensi anggaran dalam pencapaian targetnya.

Sasaran strategis kedua meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dengan indikator kinerja indeks kepuasan PNS terhadap pelayanan administrasi kepegawaian berdasarkan hasil assesmen terdapat tingkat efisiensi 38,65 %.

7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun Program dan Kegiatan yang sangat berpengaruh dalam menunjang pencapaian kinerja utama adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

2. Program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan :
 - a. Seleksi penerimaan CPNS,
 - b. Penempatan PNS,
 - c. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
 - d. Pembangunan dan pengembangan system informasi Kepegawaian Daerah
 - e. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin
 - f. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas dan
 - g. Pelaksanaan sumpah/janji PNS.

Layanan yang diberikan adalah sebagai berikut :

- Izin Perkawinan/Perceraian sebanyak 14 orang,
- Pemakaman PNS yang meninggal dunia sebanyak 5 orang,
- Hukuman Disiplin PNS sebanyak 17 PNS,
- Kenaikan Gaji Berkala sebanyak 2882 SK,
- Cuti sebanyak 1022 PNS,
- Penerbitan Kartu Identitas Pegawai sebanyak 41 Kartu,
- Penyerahan Satyalancana Karya Satya sebanyak 213 PNS
- PNS yang paham terhadap Peraturan Kepegawaian 150 orang
- Update data Pegawai 1500 PNS

Dari rata-rata capaian terealisasi sebesar 100%

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 10.841.897.650,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.110.120.176,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 56,36 %.

Komposisi belanja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 3.2.11
Komposisi Belanja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Tahun Anggaran 2019
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	8.570.311.600,00	4.284.731.034,00	80,35
2	Belanja Tidak Langsung	2.271.586.056,00	1.825.389.142,00	49,99
Jumlah		10.841.897.650,00	6.110.120.176,00	56,38

Sumber: Laporan Keuangan tahun 2019

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 80,35 % terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2019, dan sisanya sebesar 49,99 % disumbangkan belanja tidak langsung. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 10.841.897.650,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.110.120.176,00 atau 56,38 %, dibandingkan dengan tahun 2018 bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 86,18 % terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2018, dan sisanya sebesar 96,52 % disumbangkan belanja tidak langsung. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 5.577.990.485,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.010.971.737,00 atau 89,83 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.12
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis

dan Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten	3.025.779.000,00	2.849.520.083,00	94,17
2	Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas	5.066.079.500,00	990.285.078,00	19,54
	Jumlah	8.091.858.500,00	3.839.805.161,00	47,45

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Badan Kepegawaian pada tahun 2019.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.13

**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten	1	84,26	2.849.520.083,00	94,17
2	Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas	1	85,00	990.285.078,00	19,54
	Jumlah	2	169,26	3.839.805.161,00	47,45

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 terdapat pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dengan indikator kinerja Indeks kepuasan PNS terhadap pelayanan Administrasi kepegawaian terdapat

Program Peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya menunggu petunjuk teknis terbaru tentang pakaian dinas ASN.

1.4 Analisa Efisiensi Anggaran

Efisiensi adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan anantara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya.

Berikut ikhtisar tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dengan membandingkan antara target dan realisasi (1) anggaran, (2) realisasi fisik.

Kode	Program dan kegiatan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi sd. 31 Des 2019	%	Fisik (%)
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
01.01	Pelayanan jasa surat menyurat	11.660.000,00	10.959.000,00	93,99	100
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	39.500.000,00	33.431.476,00	79,63	100
01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	12.775.000,00	12.775.000,00	100	100
01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan Dinas/operasional	3.700.000,00	2.288.800,00	61,86	100
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.857.630,00	13.790.500,00	99,52	100
01.10	Penyediaan alat tulis Kantor	44.265.000,00	43.165.000,00	97,51	98,46
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	47.520.470,00	47.346.800,00	99,63	99,97
01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.800.000,00	4.505.000,00	93,85	100
01.17	Penyediaan makanan dan minuman	29.095.000,00	26.715.000,00	91,82	100

01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	160.000.000,00	157.592.168,00	98,50	100
01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	4.000.000,00	3.982.500,00	99,56	100
02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur				
02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	25.000.000,00	24.959.090,00	99,84	100
02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	29.322.700,00	28.165.000,00	96,05	100
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	17.370.000,00	10.061.500,00	57,92	100
02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.587.300,00	447.300,00	9,75	100
02.28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	20.000.000,00	13.892.739,00	69,46	100
03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				
03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	3.526.095.000,00	45.440.687,00	1,29	0
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
05.06	Pendidikan & pelatihan Prajabatan bagi CPNSD	1.099.047.000,00	1.094.342.000,00	99,57	100
05.08	Pendidikan & pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD	717.202.000,00	562.456.763,00	78,42	100
06	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	100	100
06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2.000.000,00	2.000.000,00	100	100

06.04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	5.500.000,00	5.350.000,00	97,27	100
28	Program Pendidikan Kedinasan				
28.02	Pendidikan penjenjangan struktural	1.209.530.000,00	1.192.721.320,00	98,61	100
30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				
30.02	Seleksi penerimaan PNS	473.264.000,00	184.817.880,00	39,05	62,56
30.03	Penempatan PNS	354.054.000,00	256.145.603,00	72,35	100
30.04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	42.300.000,00	41.200.000,00	97,40	126
30.05	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	60.000.000,00	56.921.129,00	94,87	100
30.08	Pemberian Penghargaan bagi PNS	218.100.000,00	120.859.420,00	55,41	55,47
30.09	Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	376.266.500,00	269.632.981,00	71,66	100
30.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	16.000.000,00	15.267.378,00	95,42	100
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	8.570.311.600,00	4.284.731.034,00	50,00	
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.271.586.050,00	1.825.389.142,00	80,36	
	JUMLAH BELANJA TOTAL	10.841.897.650,00	6.110.120.176,00	56,36	

- Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan

Sisa Anggaran Rp. 4.731.777.474,-

Jumlah tersebut merupakan sisa anggaran yang belum dicairkan maupun anggaran yang sudah dicairkan. Sisa anggaran yg sdh dicairkan (UYHD) sebesar Rp. 104.420.800,- Dan sisa anggaran yang belum dicairkan sebesar Rp. 4.731.777.474,-.

Sisa anggaran secara keseluruhan terdiri dari :

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja tidak langsung	2.271.586.050,00	1.825.389.142,00	446.196.908,00
2	Belanja langsung	8.570.311.600,00	4.284.731.034,00	4.285.580.566,00
	Jumlah	10.841.897.650,00	6.110.120.176,00	4.731.777.474,00

Realisasi Belanja

Belanja tidak langsung Rp. 1.825.389.142,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja tidak langsung tahun anggaran 1 Januari 2019 saampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari :

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.578.882.820,00	1.398.752.382,00	88,59
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	692.703.230,00	426.636.760,00	61,59
	Jumlah	2.271.586.050,00	1.825.389.142,00	80,36

Belanja Langsung Rp. 4.284.731.034,00

Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 4.231.606.944,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai habis	58.217.130,00	52.038.500,00	89,39
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	31.800.500,00	27.317.500,00	85,90
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	76.925.000,00	69.911.476,00	90,88
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.270.000,00	7.550.300,00	46,41
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.646.670,00	95.988.200,00	95,37
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	154.295.000,00	76.010.000,00	49,26
5.1.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.359.930.000,00	1.070.000,00	0,03
5.1.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	4.500.000,00	4.500.000,00	100
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.518.386.300,00	1.200.950.629,00	79,09

5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	20.447.300,00	14.340.039,00	70,13
5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultasi	108.000.000,00	35.000.000,00	32,41
5.1.2.20	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.339.000,00	3.149.900,00	94,34
5.1.2.22	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,0
5.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.397.912.000,00	2.288.312.000,00	95,43
5.1.2.24	Belanja Honorarium Non PNS	2.990.000,00	2.728.400,00	91,25
5.1.2.25	Belanja Honorarium PNS	662.330.000,00	352.740.000,00	53,26
	JUMLAH	8.515.988.900,00	4.231.606.944,00	85,76

Belanja Modal sebesar Rp. 53.124.090,00

Merupakan realiasi pengeluaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dilakukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala periode Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagaimana lampiran (daftar Belanja Modal Tahun 2019).

Kode Rekening	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	Persentase
	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>			
5.2.3.29.05	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan Laptop dan Hardisk External	25.000.000,00	24.959.090,00	99,84
	Jumlah	25.000.000,00	24.959.090,00	99,84

Catatan :

1. Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan 2 unit Laptop Merk Asus TP412FA pada Toko Info Komputer Centre Banjarmasin sesuai surat pesanan Nomor : 800/008-Barjas/Umpeg/VIII/BKPP/2019 tanggal 24 Agustus 2019 senilai @ Rp. 12.000.000,- total Rp. 24.000.000,00 dan Pengadaan 1 buah Hardisk External merk Seagate senilai Rp. 959.090,00 jadi Jumlah total sebesar Rp. 24.959.090,00.

Merupakan realiasi pengeluaran Belanja Modal Gedung dan bangunan yang dilakukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala periode Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagaimana lampiran (daftar Belanja Modal Tahun 2019).

Kode Rekening	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	Persentase
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
5.2.3.49.01	Belanja modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan bangunan gedung kantor	29.322.700,00	28.165.000,00	96,05
	Jumlah	29.322.700,00	28.165.000,00	96,05

Catatan :

1. Belanja modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan bangunan gedung kantor berupa penambahan daya listrik pembayaran melalui Toko Intan Payment Intan Ponsel Marabahan berdasarkan surat pesanan Nomor : 800/010-BARIAS/Umpeg/X/BKPP/2019 tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp. 3.965.000,00 dan rehab gedung ruang pelayanan satu pintu secara penunjukan langsung pada CV. Fhanasa Marabahan berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 001/PL-BKD/2019 tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp. 24.200.000,00.

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100 %. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.2.14
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran IKU ke 2
Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas	1	85,00	19,54	65,46
	Jumlah	1	85,00	19,54	65,46

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala.

Bab IV Penutup

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program, maupun kinerja kegiatan, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Dalam tahun 2018 Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 hasil reuiu yang ingin dicapai. Secara rinci **pencapaian sasaran Tahun 2019** dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategi I terdiri dari 1 indikator dengan capaian 84,26 %
2. Sasaran Startegi II terdiri dari 1 indikator dengan capaian 100 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran diatas 100 % dan yang termasuk dalam Interpretasi sesuai target. Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala DPA Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019 Rp. 10.841.897.650,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.110.120.176,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 56,38 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 4.731.777.474 atau 43,64 %.

Adapun anggaran belanja yang terkait dengan pencapaian sasaran strategis tahun 2019 adalah sebesar Rp 8.091.858.500,00 dengan realisasi sebesar 3.839.805.161,00 atau 47,45 %.

Marabahan, 26 Februari 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,**


Drs. H. HARDIAN NOOR, M.Si
NIP. 19600909 198202 1005